

Model Penelitian Kebijakan Kualitatif ”Tohardi”

Ahmad Tohardi¹

1. Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura

Korespondensi Penulis : ahmadtohardi@faperta.untan.ac.id

Abstract

The Policy Research Model that uses the quantitative approach is more complicated and commonly used by a quantitative paradigm. Therefore, there must be the other alternative methods that simpler, more pragmatic, and effective methods but without decreasing the scientific values. In this paper, The researcher suggest that a qualitative research model called the “ Tohardi’s qualitative research model abbreviated as MPKKT. MPPKKT is designed by the conventional or classic model. They are 1. Pre survey using the naturalistic model in exploring the various problems., 2. Focus Group Discussion (FDG-1) is as a research formulating, 3. Focus Group Discussion (FDG-2) is as a policy formulation, 4. Expert Judgment is as an evaluation of an eligibility policy, 5. Discussion with the stakeholders in considering the policy output to implement it. MPKKT has been applied on the thesis research by the postgraduate students in Magister Program of Social Sciences in Fisip Untan. Based on the above application, here can be inferred that simple and more practical in implementing it. Besides, because it is used the social policy paradigm, it has a highly probability in implementing it by the users.

Key words: Policy Research, The Tohardi’s Qualitative Policy Research Model (MPKK).

1. PENDAHULUAN

Penelitian kebijakan pada hakekatnya adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan atau rekomendasi alternatif kebijakan. Rekomendasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk membuat Kebijakan Publik (*public policy*) guna memecahkan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh pemerintah khususnya.

Fakta empirik menunjukkan bahwa banyak orang mampu membuat kebijakan dengan "baik", namun banyak pula kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut gagal untuk diimplementasikan. Sebuah kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya baik dalam bentuk substansi kebijakan, tetapi yang lebih penting adalah dapat tidak kebijakan tersebut diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan gagal untuk diimplementasikan, maka kebijakan tersebut dikategorikan sebagai sebuah kebijakan yang buruk, walaupun secara substansi kebijakan yang bersangkutan masuk dalam kategori kebijakan yang baik.

Hal itu disebabkan karena esensi dari sebuah kebijakan adalah untuk menyelesaikan masalah, semenetara sebuah kebijakan yang masih dalam bentuk dokumen tentu tidak akan dapat berbuat banyak dalam menyelesaikan masalah. Karena efektif tidak sebuah kebijakan baru akan terlihat setelah diimplementasikan. Analogi sebuah kebijakan adalah *Resep Masakan*, kita baru dapat menilai keistimewaan sebuah *Resep Masakan* tersebut setelah

dipraktekkan dalam proses pemasakan menjadi makanan, selama *Resep Masakan* tersebut masih dalam bentuk catatan di kertas, maka selama itu pula kita tidak bisa menilai apakah *Resep Masakan* itu istimewa atau tidak.

Selanjutnya kasus-kasus kebijakan yang menuai banyak hambatan dalam pelaksanaannya (implementasi) bahkan tidak jarang menuai kegagalan total. Seperti kebijakan "gambut sejuta hektar" di Kalimantan Tengah oleh pemerintah Orde Baru (Orba) beberapa dekade yang silam. Kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasi dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Kalimantan Tengah karena terkendala berbagai faktor teknis, sehingga akhirnya kebijakan "gambut sejuta hektar" tersebut gagal mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya.

Untuk itu mungkin muncul pertanyaan, dimana letak kegagalan kebijakan tersebut? Salah satu penyebab kegagalannya adalah karena kurang atau bahkan tidak dilakukan penelitian kebijakan sebelum pembuatan kebijakan yang bersangkutan. Akibatnya antara kebijakan dengan *action* dilapangan (implementasi) mengalami pertautan atau kesenjangan yang sangat lebar, apa yang sudah dirumuskan di dalam kebijakan ternyata sulit untuk dilaksanakan dilapangan (terlalu "mengawang-awang").

Untuk itu idealnya, dalam proses pembuatan kebijakan, harus didahului dengan penelitian kebijakan (*policy research*). Karena hasil penelitian

kebijakan akan dapat memberikan banyak data dan informasi yang penting bagi seorang *policy maker* dalam proses merumuskan kebijakannya, agar supaya kebijakan yang dihasilkan tersebut lebih membunji. Namun tidak sedikit yang menolak diadakannya Penelitian Kebijakan sebelum merumuskan kebijakan, alasannya karena biaya Penelitian Kebijakan relatif mahal. Padahal kebijakan yang gagal, akibat tidak dilakukan Penelitian Kebijakan, biayanya bisa lebih besar dari biaya penelitian, bahkan terkadang besarnya "ongkos sosial" tidak ternilai, misalnya akibat sebuah kebijakan yang salah, sehingga memicu protes atau demonstrasi besar-besaran, muncul kerusuhan, penjarahan, anarkis bahkan dapat menimbulkan konflik sosial yang berujung pada pertumpahan darah dan tidak berkesudahan. Untuk itu dampak sosial dari sebuah kebijakan yang salah, seringkali tidak dihitung dan yang selalu dihitung adalah biaya Penelitian Kebijakannya.

Beranjak dari fakta tersebut dapat ditarik "benang merah" bahwa dengan dilakukan Penelitian Kebijakan justru dapat menghemat biaya sosial khususnya. Sehingga bila kita cermati peristiwa yang terjadi selama proses implementasi, maka semakin meyakinkan kita bahwa, betapa pentingnya sebuah Penelitian Kebijakan dalam rangka menyelesaikan masalah publik atau meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Namun Model Penelitian Kebijakan Bidang Sosial (*social policy research*)

yang ada saat ini masih sedikit, sehingga para peneliti penelitian kebijakan (*policy research*) kurang memiliki alternatif atau referensi dalam memilih metode penelitian kebijakan bidang sosial yang sesuai "selera ilmiah peneliti". Untuk itu melalui tulisan ini, penulis usulkan sebuah model penelitian kebijakan kualitatif sebagai alternatif khususnya untuk penelitian kebijakan dibidang sosial. Model penelitian kebijakan kualitatif yang diusulkan tersebut tampil lebih sederhana daripada format-format model penelitian kebijakan yang lain, sehingga akan memberikan kemudahan bagi para peneliti penelitian kebijakan dalam menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan.

Model penelitian kebijakan kualitatif ini diberi nama *Model Penelitian Kebijakan Kualitatif "Tohardi"* yang disingkat MPKKT. MPKKT merupakan hasil rancangan atau desain penulis sendiri. MPKKT diciptakan sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan Program Doktor bidang Metodologi Penelitian. Untuk itu MPKKT sudah diujicoba dalam penelitian Disertasi dengan judul "*Model Pendidikan Multikultural Di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat*" pada tahun 2008-2009 yang lalu, dan dengan hasil *Sangat Memuaskan (Cum Laude)*.

2. MODEL PENELITIAN KEBIJAKAN
Proses penelitian dengan menggunakan *Model Penelitian Kebijakan Kualitatif "Tohardi"* dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, 1). Tahap pre survei, 2). Tahap

memotret realitas sosial, dan 3). Tahap perumusan kebijakan. Ketiga tahapan penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Model Penelitian Kebijakan Kualitatif "Tohardi"

1. Pre-Survei

Pre survei atau *Penelitian Pendahuluan* merupakan langkah pertama dalam MPKKT, sehingga disebut dengan **Penelitian Tahap-1**. Dalam penelitian *Pre survei* atau *Penelitian Pendahuluan*, selain mengurus berbagai perizinan kepada pihak-pihak yang berkompeten, peneliti juga melakukan berbagai pemetaan (*mapping*) seperti pemetaan lokasi penelitian, pemetaan "penjaga gawang" penelitian, pemetaan responden atau subjek penelitian, pemetaan kultur, sosial, budaya dan politik, dan berbagai pemetaan lainnya.

Hasil kegiatan *Pre survei* atau *Penelitian Pendahuluan*, idealnya diharapkan mampu memberikan gambaran atau deskripsi yang jelas dan lengkap (holistik) tentang apa dan bagaimana memulai penelitian berikutnya yaitu *Inquiry*, *FGD-1*, *FGD-2* dan seterusnya sampai menghasilkan sebuah rekomendasi. Selain itu *Pre survei* atau *Penelitian Pendahuluan* dapat

menjadi wahana untuk mengoreksi berbagai data dan informasi yang kurang benar (verifikasi) mengenai objek dan subjek penelitian. Untuk itu *Pre survei* atau *Penelitian Pendahuluan* menjadi tahap yang cukup penting yang harus dijalani oleh peneliti kebijakan yang menggunakan MPKKT dalam menyelesaikan sebuah proyek penelitian kebijakan.

2. Inquiry (*Memotret Realitas Sosial & Politik*)

Upaya memotret realitas sosial dan politik merupakan tujuan dari **Penelitian Tahap-2**. Penelitian Tahap-2 ini menggunakan *Qualitative Inquiry Models* untuk memotret realitas sosial dan politik khususnya. Tujuan memotret realitas sosial dan politik tersebut sebagai bahan atau dasar berpijak dalam menyusun *Draft Kebijakan* yang merupakan bahan untuk dibahas di *FGD-1*. Agar hasil pemotretan tersebut lebih sempurna, lengkap, menyeluruh dan mendalam, dan dapat dilihat serta dipahami dari perspektif yang sama dengan pembaca atau peneliti yang lain, maka perlu disamakan pandangan (perspektif) atau paradigma penelitiannya.

a. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian sosial (Sosiologi) ada tiga, yaitu: *Paradigma Fakta Sosial*, *Paradigma Definisi Sosial* dan *Paradigma Perilaku Sosial*. Pertama *Paradigma Fakta Sosial* lebih fokus pada *Struktur* dan *Pranata Sosial*, analisisnya cenderung kepada makro yaitu dengan menganalisis masyarakat

secara utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Kedua *Paradigma Definisi Sosial* sebaliknya yang beraliran *Interaksionis Simbolik*, yaitu analisisnya berskala mikro (individu) dan “meniadakan kosep masyarakat, negara dan Institusi Sosial lainnya”, karena menurut pandangan *Paradigma Definisi Sosial* ini, masyarakat, negara dan Institusi Sosial lainnya yang berada di “diluar” individu, semuanya bersifat abstrak. Hal itu tentunya dapat mengandung kelemahan seperti yang dikemukakan Agus Salim (2006:269) bahwa “orientasi yang bersifat mikro, memiliki kelemahan ketika analisis dirunutkan kepada masalah yang berskala besar (makro), seperti dalam bentuk Struktur Sosial dan Sistem Sosial”.

Ketiga yaitu *Paradigma Perilaku Sosial* analisisnya holistik dan komprehensif antara skala mikro (individu) dan makro (struktur sosial dan sistem sosial) seperti yang dikemukakan oleh Zamroni (1992:65) bahwa “*paradigma perilaku sosial* memusatkan perhatiannya pada hubungan antar individu dengan lingkungannya”. Dikatakan selanjutnya “perbedaan pandangan antara *paradigma perilaku sosial* dengan *paradigma fakta sosial* terletak pada sumber pengendalian tingkah laku manusia”.

b. Jenis Penelitian

Penelitian tahap-2 (*Inquiry*) yang bertujuan untuk pemotretan atau mendeskripsikan realitas sosial dan politik khususnya, menggunakan *Jenis Penelitian Studi Kasus, Pendekatan*

Penelitian Kualitatif, Macam Penelitian Deskriptif dan Model Penelitian Deskriptif Kualitatif. Penggunaan jenis, pendekatan, macam dan model penelitian ini untuk pemotretan realitas sosial dan politik dinilai lebih cocok, karena analisisnya dapat lebih mendalam, fokus, lengkap, holistik dan komprehensif antara pemotretan skala mikro yaitu memotret individu, dengan pemotretan skala makro, yaitu memotret Struktur Sosial dan Sistem Sosial.

Tidak digunakannya paradigma penelitian kuantitatif dalam pemotretan realitas sosial ini karena kajian kuantitatif itu sering hanya mampu menghasilkan informasi mengenai kecenderungan gejala-gejala atau fenomena yang diteliti saja, sehingga bersifat superfisial dan dampaknya yaitu menyembunyikan banyak kebenaran yang seharusnya dapat diungkapkan melalui pemotretan realitas sosial dan politik tersebut. Karena menurut Strauss & Corbin (2003), penelitian (pemotretan realitas sosial dan politik) pada dasarnya merupakan penelitian atau pemotretan tentang sosial-budaya, maka dalam penelitian tersebut, *perkataan* dinilai lebih bermakna daripada *angka-angka*, sehingga jika penelitian tersebut dilakukan dengan benar, maka penelitian kualitatif dalam konteks penelitian ini, akan menghasilkan *pemaknaan* yang lebih tajam daripada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penggunaan jenis penelitian kualitatif dalam model penelitian MPKKT ini dimaksudkan agar pemotretan realitas sosial dan politik ini

menjadi lebih terarah, tajam, terfokus dan mendalam. Selanjutnya dengan selalu melakukan proses berpikir reflektif (*the always think reflectifly*) menurut Denzin & Lincoln (1994) akan mampu menemukan *makna* dibalik *fakta*. Dengan menemukan *makna* dibalik *fakta* tersebut, selanjutnya peneliti akan dapat memahami *fakta* dibalik *kenyataan*, sehingga pada akhirnya peneliti akan mampu menemukan *hakekat* dari gejala-gejala sosial atau fenomena yang diamati atau diteliti tersebut.

c. Penelitian Studi Kasus

Penelitian kebijakan model MPKKT ini pada dasarnya berbasis jenis penelitian *Studi Kasus*, alasannya adalah *pertama*, karena “kebanyakan *Studi Kasus* dalam penelitian kebijakan bersifat kualitatif” (Sudarwan Danim, 2005). *Kedua*, “metode *Studi Kasus* seringkali digunakan dalam penelitian kebijakan, sebagai studi yang cepat, biaya efisien” (Sudarwan Danim, 2005). *Ketiga*, karena penelitian *Studi Kasus*, dapat mengkaji *Unit Sosial* tertentu secara mendalam, dan lengkap tentang situasi yang kompleks dengan cara menguji perilaku dalam konteks, sehingga hasilnya akan mampu memberikan gambaran (potret atau deskripsi) yang luas, jelas dan mendalam mengenai *Unit Sosial* yang diteliti atau dikaji tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Djudju Sudjana (2006), Bahwa Penelitian *Studi Kasus* “dapat digunakan untuk semua *Unit Sosial* seperti individu, kelompok, lembaga, komunitas maupun untuk peristiwa dan sebagainya”.

d. Tempat dan Waktu Penelitian

1). Tempat Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian, didasari atas pertimbangan bahwa, *pertama*, kondisi sosio-politik-kultural masyarakat yang akan dipotret itu unik. Keunikan masyarakat itulah yang menjadi pertimbangan utama pemilihan tempat penelitian ini. *Kedua* di tempat atau lokasi penelitian terdapat permasalahan yang akan diteliti (dipotret).

2). Waktu Penelitian

Penelitian dimulai sejak di keluarkannya izin penelitian oleh pejabat yang berwenang di wilayah penelitian. Dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan “gambar” yang jelas dan lengkap dari realitas sosial-politik yang dipotret, peneliti memerlukan waktu yang tidak terbatas. Batasan waktu dalam pengumpulan data bersifat relatif, karena waktu pengumpulan data tersebut sangat tergantung kepada *Kejenuhan Data (Saturasi Data)*. Untuk jika waktu pengumpulan data dan informasi dibatasi, dikhawatirkan data dan informasi yang terkumpul belum lengkap, sehingga akhirnya membuat penelitian tersebut tidak dapat mencapai kualitas yang maksimal.

e. Subjek dan Objek Penelitian

1). Subjek Penelitian

Penentuan *Subjek Penelitian*, yaitu mensinergikan antara subjek atau Informan Kunci (*key informant*) dengan subjek *Social Action* (subjek penelitian yang berasal dari kalangan “akar rumput” atau

grass-roots). Informasi yang diperoleh dari informan kunci dibandingkan (diverifikasi) dengan informasi yang diperoleh dari kalangan “akar rumput”, sehingga data yang di peroleh menjadi lebih kredibel, karena sudah melalui proses *Validitas* dan *Reliabilitas* data.

Subjek Penelitian dalam penelitian tahap-2 (*Inquiry*) ini dapat berupa warga masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh politik, tokoh agama, birokrat (camat, kepala desa, kepala dusun, ketua RT/RW), pengurus organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, TNI, Polri dan sebagainya. Pemilihan *Subjek Penelitian*, dilakukan secara bertujuan (*purposive*) dan terus berkembang seperti bola salju (*snowball*) sampai data yang dikumpulkan dianggap sudah memuaskan (jenuh).

2). Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Sebagai contoh *Objek Penelitian* yaitu: “pendidikan multikultural di dalam keluarga”, “proses interaksi sosial masyarakat di perbatasan”, “perilaku pemilih dalam Pemilu”, konflik social, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa *Objek Penelitian* adalah *Masalah* atau *Permasalahan* yang diteliti atau yang dicari pemecahan masalahnya (solusi).

f. Setting Penelitian

Dalam *The Naturalistic-Ecological*

Theory dikatakan bahwa: ”perilaku manusia pada hakekatnya dipengaruhi oleh latar belakang perilaku itu sendiri” (Zamroni, 1992). Dengan demikian untuk mengetahui hakekat dari *Perilaku Sosial* masyarakat, maka *setting* penelitian harus alami (naturalistik). Maksud *setting* penelitian alami (*natural setting*) adalah, peneliti tidak melakukan intervensi baik dalam pengamatan (observasi) maupun dalam melakukan wawancara. Dengan demikian berarti data harus diambil dalam situasi yang wajar, artinya peneliti mengumpulkan data dan informasi harus berdasarkan situasi yang apa adanya (natural), situasi tersebut tanpa dipengaruhi dengan sengaja oleh peneliti. Sebagai contoh : ”Setting penelitian di keluarga”, ” Setting penelitian di sekolah”, ” Setting penelitian di masyarakat”, ” Setting penelitian di organisasi” dan sebagainya.

g. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1). Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian (pemotretan realitas sosial-politik) ini adalah: 1). Observasi partisipatif (*participative observation*), 2). Wawancara yang mendalam (*in-dept interview*) dengan para informan (subjek penelitian) guna mendapatkan pengertian fenomenologis. dan 3). Dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang sejarah konflik, sejarah, deskripsi wilayah lokasi

penelitian, dan lain-lain, dalam bentuk tabel, narasi dan foto (gambar). Dalam pelaksanaan teknis dilapangan, peneliti "menenggelamkan diri" dalam kehidupan orang-orang dan situasi yang ingin diselidiki (Bogdan & Taylor,1992). Dengan kontak langsung yang lama dengan subjek/objek tersebut memungkinkan peneliti dapat melihat dengan jelas proses yang terjadi. Selain itu peneliti juga dapat mencari "makna dibelakang kelakuan (perbuatan) atau ucapan", sehingga dapat memahami masalah dan situasi yang sedang diteliti. Metode ini berusaha untuk memahami kelakuan manusia dalam konteks yang lebih luas dan dipandang dari kerangka pemikiran serta perasaan *Subjek Penelitian* (perspektif emik). Peneliti harus mengutamakan data langsung atau *first hand*, untuk keperluan itu maka peneliti itu sendiri yang harus turun kelapangan secara aktif untuk mengadakan observasi, wawancara dan mencari berbagai bahan dari dokumen-dokumen yang relevan.

Prosedur pengumpulan data dimulai dari *Studi Pendahuluan* (*pre survey*), pengamatan atau observasi, melakukan wawancara dengan *Subjek Penelitian* atau *Informan* kunci dan mencari data-data yang relevan melalui dokumen-dokumen. Selanjutnya membuat pradesain, seminar predesain, memasuki lapangan, mengumpul data, menganalisis

data, membuat laporan/ verifikasi, menemukan pertanyaan baru dan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data kembali demikian terus menerus sampai datanya jenuh, sehingga proses pengumpulan data dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti sebuah spiral.

2). Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen atau "alat" untuk pengumpulan data dalam penelitian MPKKT ini adalah *peneliti itu sendiri* sebagai Instrumen Utama. Sehingga posisi peneliti dalam pengumpulan data merupakan Instrumen Kunci (*key instrument*). Namun demikian dalam pengambilan data berupa gambar dan suara, peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti kamera, *handycame* dan *tape recorder* dan sebagainya.

h. Teknik Keabsahan Data

Teknik atau cara untuk pencapaian keabsahan data atau untuk mencapai kredibilitas hasil penelitian, dalam model penelitian MPKKT ini peneliti menggunakan 4 (empat) Teknik Keabsahan Data, yaitu: 1). Makna dalam konteks, 2). Triangulasi, 3). Komperasi, dan 4).Saturasi Data.

Makna dalam konteks, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini, dipahami dalam konteks yang holistik dan naturalistic yang mengacu kepada makna yang terdapat dalam konteks sejenis. Sebagai contoh ketika memaknai

arti pembauran, ada *Subjek Penelitian* yang mengatakannya dengan “kami selalu aktif melaksanakan kegiatan gotong royong”, sementara *Subjek Penelitian* yang lain mengatakan “kami setiap minggu selalu bermain bulu tangkis”. Dalam konteks pembauran, kegiatan gotong royong dan bermain bulu tangkis memiliki *makna yang sama*, yaitu sama-sama wadah untuk menciptakan pembauran di dalam masyarakat.

Triangulasi, artinya data yang didapat dari *Subjek Penelitian* di verifikasi dengan *Subjek Penelitian* yang lain (*Triangulasi Sumber*). Sebagai contoh ketika dilakukan wawancara dengan seorang guru yang pertama, ia mengatakan bahwa “sebelum memulai pelajaran biasanya anak-anak diberikan nasehat terlebih dahulu sekitar 10 menit”. Dari keterangan guru yang pertama tersebut, selanjutnya dikonfirmasi dengan murid-murid apakah betul guru-guru sebelum memulai pelajaran biasanya anak-anak diberikan nasehat terlebih dahulu sekitar 10 menit? Jika ada kecocokan data atau informasi antara guru dengan murid maka data tersebut sudah kredibel.

Triangulasi kedua yang digunakan dalam penelitian MPPKT ini adalah *Triangulasi Teknik*, artinya untuk mencapai tingkat kredibilitas yang tinggi maka selain dengan cara membandingkan data dan informasi dari *Subjek Penelitian* pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, juga dengan membandingkan antara data dan informasi dari hasil Wawancara, hasil Observasi dan Dokumen yang sudah dikumpulkan, apakah dari ketiga

Teknik Pengumpulan Data tersebut sudah menghasilkan data atau informasi yang sama atau belum. Capaian kredibilitas itu diperoleh apabila data dan informasi yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi dan Dokumen itu sama.

Komperasi, yaitu peneliti mencari kasus-kasus yang berbeda atau yang bertentangan dengan apa yang telah ditemukannya. Maksudnya adalah supaya peneliti memperoleh hasil yang lebih tinggi tingkat kepercayaannya yang mencakup situasi-situasi yang lebih luas, sehingga apa yang semula tampaknya berlawanan akhirnya dapat diliputi dan tidak lagi mengandung aspek-aspek yang tidak sesuai. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ke daerah-daerah lain sebagai perbandingan.

Saturasi Data atau *Kejenuhan Data*, adalah pembatas jumlah *Subjek Penelitian* yang diwawancarai atau yang diobservasi. Artinya capaian kredibilitas diperoleh sampai data dan informasi yang diperoleh dari *Subjek Penelitian* sudah menetap, tidak berpola atau sudah tidak ada lagi data dan informasi yang baru (sudah jenuh). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peneliti tidak boleh berhenti menggali data dan informasi dari *Subjek Penelitian* selama data dan informasi secara substansi dan esensi itu masih berkembang.

i. Teknik Analisis Data

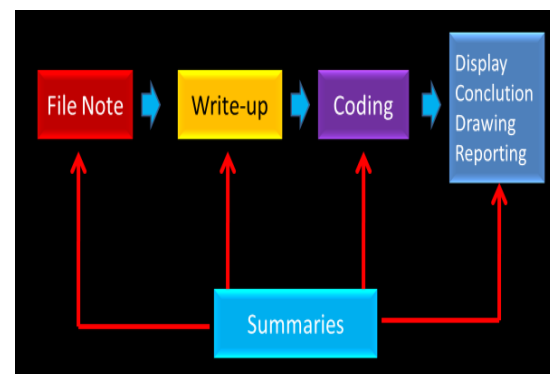
Data yang diperoleh dari hasil Wawancara, Observasi dan Dokumen selanjutnya disusun dengan menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori, untuk menghindari

“chaos”. Selanjutnya dilakukan penafsiran atau interpretasi terhadap data atau informasi yang bersangkutan guna memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan berbagai konsep. Sehingga *Interpretasi* yang dilakukan oleh seorang peneliti menggambarkan perspektif atau pandangan “orang dalam” (perspektif emik) bukan pandangan peneliti (perspektif etik).

Data dan informasi yang diperoleh setiap hari, dari setiap selesai penelitian, langsung dilakukan analisis hari itu juga. Hal itu dimaksudkan agar supaya tidak lupa dalam menganalisis (karena harus mengkaitkan antara data yang satu dengan data yang lainnya), selain itu bila terjadi pengembangan ide atau munculnya gagasan atau pertanyaan baru tentang tema-tema penelitian, maka dapat langsung digali (diperoleh) pada saat penelitian hari berikutnya, selain itu jika ada data-data yang kurang meyakinkan maka dapat segera dilakukan verifikasi kepada informannya.

Ada beberapa alasan analisis dilakukan pada saat melakukan penelitian yaitu: 1). Agar segera mengetahui data apa yang masih perlu dicari, 2). “Hipotesis” apa yang harus di tes, 3). Pertanyaan apa yang harus dijawab, 4). Metode apa yang harus diadakan untuk mencari informasi baru, 5). Kesalahan apa yang harus diperbaiki. Selain itu juga analisis yang dilakukan pada saat penelitian sedang dilakukan, akan mendorong peneliti untuk menulis laporan berkala. Karena analisis senantiasa bertalian erat dengan

pengumpulan data. Analisis dengan sendirinya akan timbul bila menafsirkan data-data yang sudah diperoleh. Semua data, setiap deskripsi mengandung tafsiran. Namun diadakan pembedaan antara data deskriptif dan data analisis atau tafsiran.”. Penjelasan tersebut diatas digambarkan secara skematis oleh Miles & Huberman (1994), berikut:



Gambar 2. Proses Analisis Data

3. Penelitian Tahap-3 (FGD-1)

Penelitian Tahap-3 (FGD-1) yaitu proses penelitian yang bertujuan untuk *Merumuskan Masalah Kebijakan (Policy Problem)*. Ada empat tahapan dalam proses merumuskan Masalah Kebijakan yaitu:

a. Pendefinisian Masalah (*problem defenition*)

Dari Meta Masalah (masalah umum/mendasar), selanjutnya dilakukan Pendefinisian Masalah, yaitu menentukan apakah itu masalah sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya yang kemudian menghasilkan Masalah Substantif

b. Spesifikasi Masalah Kebijakan (*problem specification*) .

Melalui spesifiksi masalah,

selanjutnya Masalah Substantif diubah menjadi Masalah Formal, yaitu masalah yang dirumuskan secara spesifik dan jelas.

c. Pengenalan Masalah (*problem sensing*).

Yaitu menemukan situasi masalah yang diperoleh dari hasil Perumusan Masalah yang dilakukan secara spesifik dan jelas.

d. Merekonstruksi Draft Model Kebijakan.

Yaitu menciptakan berbagai macam draft model (bentuk/isi) dari kebijakan. Draft model kebijakan tersebut merupakan solusi atau cara menyelesaikan masalah kebijakan yang ditemukan pada penelitian tahap-2.

Pertimbangan digunakannya metode *Focus Group Discussion* (FGD) yang dalam metode MPKKT disebut dengan FGD-1. adalah, *pertama* berdasarkan *Paradigma Kebijakan Sosial (Social Policy)* bahwa sebuah kebijakan yang baik yaitu bersifat *bottom-up*, artinya isi kebijakan harus digali dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat akar rumput (masalah yang ada pada masyarakat bawah), sehingga ketika diimplementasikan, kebijakan tersebut benar-benar mengakar, membumi dan mampu menjawab (memenuhi) kebutuhan masyarakat yang bersangkutan (kelompok sasaran). Pertimbangan *kedua*, seperti yang sudah dijelaskan di Latar Belakang diatas, bahwa sebuah kebijakan yang baik, bukan hanya baik dalam tatanan konsep, tetapi yang lebih

penting lagi adalah kebijakan tersebut harus *dapat diterima* dan *diimplementasikan* oleh masyarakat pengguna (*stakeholders*) atau kelompok sasaran.

Pertimbangan *ketiga*, penelitian kebijakan model MPKKT ini adalah penelitian yang bersifat aksi (terapan), sehingga agar kebijakan ini benar-benar dapat diterima dan diimplementasi oleh masyarakat pengguna, maka *perlu ditumbuhkan perasaan memiliki* kebijakan yang dihasilkan (direkomendasikan), oleh masyarakat pengguna. Selanjutnya agar masyarakat pengguna merasa memiliki kebijakan tersebut, maka mereka (masyarakat atau kelompok sasaran) perlu dilibatkan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Untuk itu dengan menggunakan FGD-1, maka masyarakat atau kelompok sasaran, sudah dilibatkan dalam proses merumuskan kebijakan tersebut. Dengan terlibatnya masyarakat atau kelompok sasaran dalam merumuskan kebijakan tersebut, maka dapat menjadi jalan bagi tumbuhnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap kebijakan yang direkomendasikan dalam penelitian ini.

Selanjutnya data dan informasi mengenai *kebutuhan-kebutuhan* masyarakat dan dapat tidaknya kebijakan yang dibuat tersebut *diterima* dan *diimplementasikan* oleh pengguna (masyarakat/*stakeholders*), tidak dapat dipahami dengan baik dengan metode *survei* atau *wawancara*. Karena menurut Irwan (2006) dalam konteks ini “pendapat kelompok menjadi penting”. Dalam kelompok seseorang (subjek) akan

berhubungan dengan lingkungan diluar dirinya dan menghadapi situasi yang mungkin diluar perkiraannya semula, situasinya menjadi *underpressure*. Sebaliknya situasi dalam wawancara, *Subjek Penelitian* dapat mendapatkan situasi *pressure* dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti. Sehingga dinilai situasi dalam FGD lebih terbuka dan natural. Untuk itu secara metodologis lebih tepat dalam penelitian tahap-3 ini metode MPKKT kemudian menggunakan metode FGD.

Menurut Irwan (2006) bahwa ada keuntungan lain penggunaan metode FGD tersebut, yaitu: “Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat dan sebagai metode yang dirasakan sangat cocok bagi permasalahan yang bersifat sangat lokal dan spesifik”. Sehingga dikatakan selanjutnya bahwa “FGD yang melibatkan masyarakat setempat dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai”.

4. Penelitian Tahap-4 (FGD-2)

Penelitian Tahap-4 juga menggunakan metode *Fokus Group Discussion*, sehingga dinamai dengan FGD-2. Tujuan FGD-2 ini adalah melakukan peramalan terhadap probabilitas imlementasi dari kebijakan yang direkomendasikan. Ada tiga tahapan kegiatan dalam FGD-2 yaitu:

- a. Peramalan.
 - b. Pengembangan Alternatif Kebijakan.
 - c. Pemilihan Alternatif Kebijakan yang terbaik.
- Sehingga peserta FGD-2 ini adalah

orang-orang yang mempunyai spektrum pengetahuan dan pengalaman yang luas terhadap objek kebijakan yang direkomendasikan. Dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, maka peserta FGD akan mampu memilih dengan tepat dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh peneliti.

1. Pengertian *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi *Diskusi Kelompok Terfokus* (DKT), merupakan salah satu cara dari seorang peneliti untuk mendapatkan data atau informasi melalui proses *Diskusi Kelompok* yang dilakukan secara sistematis dan terarah atas suatu isu atau masalah tertentu. Sehingga menurut Isa Wahyudi (2006) FGD didefinisikan sebagai: “salah satu metode untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi bersama oleh beberapa peserta dengan menggunakan tema atau isu tertentu sebagai fokus”. Dikatakan selanjutnya bahwa “FGD merupakan suatu metode partisipasi dalam pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan dan kebutuhan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok”.

Konsep dasar dari FGD hampir sama dengan wawancara dalam proses pencarian data atau informasi dalam penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui dinamika atau kecenderungan sikap seseorang peserta atau subjek penelitian. Namun perbedaan FGD dengan wawancara “empat mata”

(wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian), adalah pada FGD peserta (subjek penelitian atau *stakeholders*) ditempatkan dalam sebuah kelompok kecil, dengan demikian peneliti dapat mengamati kecenderungan sikap peserta dalam merespon sebuah kebijakan. Selain itu dalam kelompok tersebut juga bisa diamati dan juga bisa dilihat bagaimana ia berhubungan dengan peserta yang lain khususnya dalam menghadapi situasi yang berada di luar prediksinya. Sehingga kelebihan FGD menurut Irwan (2006) adalah “dapat memberikan perspektif yang berbeda dibanding jika pengetahuan diperoleh dari proses komunikasi searah antara peneliti dengan yang di teliti”.

2. Kritik Terhadap Kelemahan FGD

Kritik terhadap kelemahan penggunaan metode FGD dalam penelitian yaitu: hasil dari FGD tidak bisa dipakai untuk melakukan generalisasi, karena FGD memang tidak bertujuan untuk menggambarkan (representasi) suara masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Meski demikian, arti penting FGD bukan terletak pada representasi hasil dengan populasi, tetapi lebih pada kedalamannya. FGD yang berbasis pendekatan induktif memang tidak bertujuan untuk generalisasi, tetapi bersifat lokalistik, namun mampu menghasilkan data dan informasi yang lebih berkualitas.

3. Etika FGD

Terdapat beberapa aturan main atau etika dalam melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD). Etika tersebut menurut

Isa Wahyudi (2006) adalah sebagai berikut:

- a) Penjelasan tujuan dan memperkenalkan peserta.
- b) Memberikan kesempatan peserta untuk menyelesaikan pembicaraanya.
- c) Menyiapkan panduan FGD.
- d) Menggunakan waktu secara efektif dan efisien.
- e) Mendokumentasikan proses pelaksanaan FGD.
- f) Menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta FGD.

4. Model FGD

Model FGD ada dua yang sering dilakukan oleh peneliti, yaitu *Model Parsial* dan *Model Konfrontatif*. Menurut Isa Wahyudi (2006) bahwa “*Model Parsial* adalah model diskusi dimana pemikiran, ide atau kepentingan peserta FGD memiliki kesamaan pandangan”, sedangkan “*Model Konfrontatif*, adalah pelaksanaan FGD bersama peserta yang secara ide, pemikiran dan kepentingan saling bertentangan, pada model ini peserta dari *stakeholders* yang saling bertentangan dihadirkan dalam forum diskusi bersama” tersebut.

FGD dalam model penelitian kebijakan ini, menggunakan *Model Parsial* karena tujuan dari pelaksanaan FGD dalam penelitian ini adalah untuk mencari kesamaan padangan dari individu dan kelompok masyarakat mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau kelompok sasaran Selain itu juga untuk menemukan kesamaan sikap dan komitmen dalam menentukan langkah-langkah kongkrit dalam

melaksanakan kebijakan tersebut dikemudian hari.

5. Jumlah Peserta FGD

Jumlah peserta FGD bersifat relatif, artinya tidak ada jumlah standar peserta yang terbaik dalam mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan FGD. Jumlah peserta sangat *tergantung dari cakupan masalah yang didiskusikan*, semakin luas masalah yang didiskusikan maka tentunya memerlukan peserta yang semakin banyak, namun sebaliknya bila cakupannya sempit, tentunya tidak memerlukan peserta yang banyak. Selain tergantung kepada cakupan permasalahan yang didiskusikan, spektrum pengalaman peserta juga mempengaruhi jumlah peserta, semakin luas spektrum pengalaman peserta, maka jumlah peserta FGD semakin sedikit. Sebagai catatan dalam FGD adalah varian pengalaman, pengetahuan dan keterampilan, sehingga jumlah peserta FGD sangat banyak, namun tidak ada variasi dalam pengalaman, pengetahuan dan keterampilan maka sebenarnya peserta 15 orang dengan 3 orang akan menghasilkan hal yang sama.

Selanjutnya jumlah peserta yang banyak, namun pesertanya kurang “berbobot” dan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara di dalam forum FGD tersebut tentunya menjadi tidak efektif. Sebaliknya pesertanya sedikit, namun pesertanya berbobot (memiliki spektrum pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang luas) dan memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat (cukup waktu untuk berdiskusi), tentunya membuat

FGD tersebut akan menjadi efektif. Karena ada kecenderungan, bahwa semakin banyak peserta semakin tidak efektif.

Jumlah peserta FGD yang ada pada berbagai literatur dan pengalaman dari berbagai pelaksanaan berbagai FGD sangat bervariasi. Sebagai contoh yang terdapat dalam panduan *diskusi kelompok terfokus* komunitas sekolah dan kelompok masyarakat oleh LIPI-UNESCO tahun 2006 disebutkan bahwa jumlah peserta FGD antara 15-20 orang. Selanjutnya FGD tentang “potensi konflik umat beragama di Jawa Tengah dan DIY”, pesertanya berjumlah 15 orang. (diambil pada tanggal 2 Desember 2009 dari <http://mediakeberagaman.com>).

Selanjutnya contoh FGD pluralisme yang berjudul “Merapatkan barisan mengusung keragaman” yang dilaksanakan di hotel Bentani, Bandung pada tanggal 19-21 Agustus 2007 diikuti oleh 23 orang peserta (diambil pada tanggal 4 Desember 2009, dari <http://abe-project.blog.friendster.com>). Demikian juga jumlah peserta dalam pelaksanaan FGD diluar negeri seperti pelaksanaan FGD se-ASEAN tentang *evaluation of communication materials* tanggal 24 Nopember 2007 yang berlangsung di negara Vietnam diikuti oleh 15 orang peserta (diambil pada tanggal 3 Desember 2009 dari <http://en.wordpress.com/tag/fgd>). Dari literatur dan berbagai pelaksanaan FGD yang sudah diuraikan tersebut menunjukkan bahwa apabila dirata-rata jumlah peserta FGD adalah sekitar 15

orang. Untuk itu, peserta FGD dalam penelitian ini direkomendasikan sekitar 10- 15 orang peserta.

6. Kreteria Peserta FGD

Kreteria peserta FGD disesuaikan dengan tujuan FGD. Tujuan utama dari FGD adalah untuk membuat rekomendasi atau merumuskan kebijakan. Sehingga peserta FGD adalah orang-orang yang terkait dengan *Objek Penelitian*. Untuk FGD-1, pesertanya adalah masyarakat atau kelompok sasaran atau pelaku dari kebijakan. Sedangkan untuk FGD-2 pesertanya adalah *kolega* (sejawat) dan *pakar*. Kreteria *kolega* (sejawat) adalah orang yang berprofesi (pelaku) dan atau pengamat tentang kehidupan sosial masyarakat yang diteliti (dipotret) dalam kurun waktu cukup lama (minimal 5 tahun). Selajutnya kreteria *pakar*, adalah pengamat dan ahli mengenai topik atau objek yang di diskusikan, berpendidikan minimal Doktor (S-3), berpengalaman yang berkaitan dengan *Objek Penelitian* dan memiliki keahlian yang relevan dengan topik FGD. Pakar dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian atau Pemerintah yang memenuhi persyaratan kepakaran.

7. Tahapan Pelaksanaan FGD.

Tahapan pelaksanaan FGD dikelompokkan menjadi dua, pertama *tahap teknis* sebelum pelaksanaan FGD, kedua *tahap proses pelaksanaan* FGD. Tahap teknis, yaitu sebelum pelaksanaan FGD dilakukan, yang merupakan tahap persiapan sebelum dimulainya pelaksanaan FGD. Ada beberapa persiapan teknis yang perlu dilakukan,

yaitu:

a) *Membentuk tim pelaksana FGD*. Agar FGD berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dibentuk tim. Anggota tim berjumlah 5 (orang), tim tersebut akan melaksanakan berbagai tugas seperti: 1 orang sebagai moderator, 1 orang bertugas mencatat proses FGD, 1 orang bertugas melakukan rekrutmen peserta dan menentukan tempat pelaksanaan FGD, 2 orang mempersiapkan logistik (konsumsi, transportasi, dokumentasi). Setelah tim terbentuk melakukan pembekalan (pengarahan) untuk menjelaskan *job description* (tugas dan tanggungjawab) masing-masing anggota tim.

b) Selanjutnya tim mempersiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan FGD seperti: bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam diskusi, alat dan bahan untuk pencatat proses (kertas, ballpoint, alat perekam), makalah ringkas untuk peserta, kertas dan *ballpoint*, serta konsumsi (*snack* dan makanan) untuk peserta, dan memastikan peserta yang hadir serta tempat pelaksanaan FGD.

Setelah persiapan teknis sudah dilaksanakan, maka tahap kedua adalah *pelaksanaan* FGD. Dalam melaksanakan FGD, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a) Memulai diskusi

Diskusi dipandu oleh moderator (peneliti), *pertama*, moderator memperkenalkan dirinya dan peserta, karena kemungkinan ada peserta yang

belum saling mengenal satu dengan lainnya, *kedua*, mengemukakan tujuan dari FDG dilaksanakan, dan ketiga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dalam FGD tersebut.

b) Pada saat diskusi berlangsung

Moderator mengarahkan jalannya diskusi agar pokok bahasannya tetap terfokus pada tema diskusi, meleraikan perdebatan yang tidak relevan, dan mengelola waktu sehingga waktu yang disediakan cukup untuk membahas permasalahan yang didiskusikan. *Pencatat proses*, bertugas mencatat atau merekam semua yang didengar dan dilihat selama proses diskusi berlangsung. Tim yang lain (anggota logistik) melakukan dokumentasi terhadap peristiwa yang dianggap penting.

c) Pada saat diskusi berakhir

Moderator segera mengakhiri diskusi apabila waktu yang dialokasikan sudah habis dan permasalahan sudah selesai didiskusikan, indikatornya semua pertanyaan atau permasalahan yang didiskusikan sudah terjawab. Pada kesempatan terakhir moderator menutup kegiatan FGD tersebut dengan mengucapkan terima kasih pemilik tempat, kepada anggota tim dan kepada peserta atas partisipasinya dalam kegiatan tersebut, moderator tidak memberikan janji kepada peserta berkaitan rekomendasi yang dihasilkan, namun tetap berharap semoga tujuan rekomendasi yang dihasilkan

kemudian hari dapat tercapai. Ini adalah etika penelitian, sebab dalam implementasi banyak hal-hal yang mungkin tidak dapat dikendalikan oleh peneliti, seperti bencana alam dan perubahan sosial, ekonomi dan politik di daerah yang akan mengimplementasi kebijakan tersebut.

8. Analisis Hasil FGD

Analisis hasil FGD bukan hanya mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang diamati, tetapi juga melakukan eksplanatori, artinya menjelaskan apa yang terjadi, menghubungkan sebab dan akibatnya dari proses berlangsungnya FGD. Sebab menurut Irwan (2006) “meskipun tidak dapat mengendalikan semua variabel penelitian dan meskipun bersifat eksploratif, tidak berarti bahwa *how* dan *why* tidak dapat kita jawab, disinilah pentingnya analisis”, artinya menjawab pertanyaan “*mengapa*” dan “*bagaimana*” merupakan hal yang mendasar dalam menganalisis hasil FGD.

Menurut Irwan (2006) “Analisis adalah upaya untuk menghubungkan berbagai elemen atau faktor yang kita identifikasi dalam data dan menjelaskannya. Data dalam FGD berbentuk data naratif, artinya berbentuk rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh peserta pada saat diskusi. Analisis itu sendiri segera dilaksanakan setelah pelaksanaan FGD berakhir.

Langkah-langkah dalam menganalisis hasil FGD, menurut Irwan (2006) adalah sebagai berikut:

Memeriksa apakah tujuan FGD sudah tercapai, antara lain dengan melihat dari jumlah pertanyaan yang ditanyakan apakah sudah sesuai dengan rencana.

- a) Adakah perubahan dalam tujuan FGD yang terjadi karena *input* dari peserta?
- b) Identifikasi masalah utaa yang dikemukakan oleh peserta. Untuk itu perhatikan tema sentral dalam diskusi tersebut.
- c) Adakah variasi peserta dalam persoalan utama ini? Bagaimana variasinya? Mengapa? Perlu diingat bahwa yang disebut variasi adalah perbedaan-perbedaan yang timbul, dari yang sangat ekstrim sampai yang hanya berbeda sedikit saja. Jika perbedaan ini muncul, maka keduanya harus disajikan (dalam laporan) secara objektif.
- d) Selain persoalan utama itu, adakah persoalan lain, tema-tema lain yang muncul dalam diskusi? Apa saja? Mana yang relevan degan tujuan FGD?
- e) Buatlah suatu kerangka periorotas dari pesoalan-persoalan yang mucnul berdasarkan sumber yang ada, kemendesakan, kemungkinan dipecahkan dalam waktu dekat, jangka menengah, jangka panjang. Selain memilih persoalan yang tidak akan kunjung selesai, terutama jika menyangkut perubahan pada tingkat makro (seperti struktur ekonomi dan politik).
- f) Melakukan koding sesuai dengan faktor-faktor yang dikehendaki seperti: relasi,

kekuasaan, kesulitan, kreativitas, kerjasama, konflik dan lain-lain. Koding-koding ini akan membantu untuk melakukan analisis yang lebih dalam.

- g) Dalam berpikir mengenai rekomendasi atau implikasi dari penelitian tersebut, maka berpikirlah besar, bertindak lokal. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa ada kemungkinan FGD dilaksanakan berdasarkan cita-cita besar, baik teoritis maupun praktis. Maka hendaknya analisis tidak menghilangkan ciri-ciri lokal data yang ada. Tugas utama adalah mencari ciri-ciri khusus dari komunitas tersebut, baru kemudian mencari mana yang berlaku secara umum di komunitas lain yang pernah diteliti.

5. Penelitian Tahap-5 (Expert Judgement)

Draft kebijakan yang sudah dibahas di FGD-2, selanjutnya direviuw atau dinilai oleh pakar. Diharapkan ada masukkan yang disampaikan oleh pakar.

6. Penelitian Tahap-6 (Diskusi Dengan Pengguna)

Tahap terakhir dari penelitian adalah Draft Kebijakan yang sudah dikritisi oleh pakar selanjutnya didiskusikan dengan pengguna kebijakan (implementor). Karena pada dasarnya diskusi dengan pengguna tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara konsep dengan aksi. Misalnya target yang ada pada kebijakan terlalu tinggi, tidak menyesuaikan

sumberdaya yang ada di lapangan, maka idealnya sebelum rekomendasi tersebut dijadikan sebuah kebijakan, maka target perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Walaupun kenyataannya penyesuaian kebijakan dengan keadaan dilapangan juga dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi kebijakan.

3. FORMAT LAPORAN PENELITIAN MPKKT

Format laporan penelitian (Skripsi, Tesis atau Disertasi) harus sesuai dengan proses penelitian. Untuk dibawah ini disusun format penelitian sesuai dengan Model Penelitian Kebijakan Kualitatif Tohardi, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penelitian
- 1.2. Identifikasi Permasalahan (jika perlu).
- 1.3. Fokus Penelitian
- 1.4. Rumusan Permasalahan
- 1.5. Tujuan Penelitian
- 1.6. Manfaat Penelitian
 - 1.6.1. Manfaat Praktis.
 - 1.6.2. Manfaat Teoritis.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Teori-teori
- 2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan
- 2.3. Kerangka Pikir Penelitian
- 2.4. Pertanyaan Penelitian

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Tahap-1:

Pengumpulan data awal dilakukan dengan wawancara, observasi dan

beberapa dokumen (informasi dari media cetak atau elektronik).

3.2. Metode Penelitian Tahap-2:

- 3.2.1. Jenis Penelitian.
- 3.2.2. Langkah-langkah Penelitian.
- 3.2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.
- 3.2.4. Subjek dan Objek Penelitian.
- 3.2.5. Instrumen Pengumpulan Data.
- 3.2.6. Teknik Pengumpulan Data.
- 3.2.7. Teknik Keabsahan Data.
- 3.2.8. Teknik Analisis Data.

3.3. Metode Penelitian Tahap-3 (FGD-1)

- 3.3.1. Tujuan FDG-1
- 3.3.2. Jumlah dan Kriteria FGD-1
- 3.3.3. Timpelaksana FGD-1
- 3.3.4. Bahan dan Perlengkapan FGD-1
- 3.3.5. Tempat Pelaksanaan FGD-1
- 3.3.6. Hari Pelaksanaan FGD-1
- 3.3.7. Tahapan Pelaksanaan FGD-1
- 3.3.8. Materi Diskusi FGD-1
- 3.3.9. Teknik Merumuskan Permasalahan (analisis kebijakan)
- 3.3.10. Analisis Hasil FGD-1

3.4. Metode Penelitian Tahap-4 (FGD-2)

- 3.4.1. Tujuan FDG-2
- 3.4.2. Jumlah dan Kriteria FGD-2
- 3.4.3. Timpelaksana FGD-2
- 3.4.4. Bahan dan Perlengkapan FGD-2
- 3.4.5. Tempat Pelaksanaan FGD-2
- 3.4.6. Hari Pelaksanaan FGD-2
- 3.4.7. Tahapan Pelaksanaan FGD-2
- 3.4.8. Materi Diskusi FGD-2
- 3.4.9. Teknik Peramalan, Pengembangan Alternatif Kebijakan dan Memilih Alternatif Kebijakan.
- 3.4.10. Analisis Hasil FGD-2

3.4. Penelitian Tahap-5 (Expert Judgement)

Hasil rewiuw pakar terhadap rekomendasi kebijakan.

3.5. Diskusi Dengan Pengguna Kebijakan

Diskusi dengan *Policy Maker* (implementor).

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Gambaran Umum

4.1.2. Hasil dan Pembahasan

Penelitian Tahap-2.

4.1.3. Hasil Penelitian Tahap-3 dan Tahap-4.

4.1.3.1. Pelaksanaan FGD-1

4.1.3.2. Pelaksanaan FGD-2

4.1.4. Diskusi Dengan Pengguna Kebijakan.

4.2. Analisis Kebijakan (Perpektif Etik).

4.3. Refleksi.

BAB V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan.

5.2. Rekomendasi.

5.3. Implikasi.

5.4. Keterbatasan Penelitian.

Daftar Pustaka

4. SIMPULAN

Model Penelitian Kebijakan Kualitatif "Tohardi" lebih praktis dan pragmatis untuk dipakai sebagai metode penelitian kebijakan bidang sosial

khususnya.

Referensi

Agus, S. (2006). *Teori & paradigma penelitian sosial*. Edisi kedua.

Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Anonimus. (2009). FGD tentang potensi konflik umat beragama di jawa tengah dan DIY. Diambil pada tanggal 2 Desember 1009 dari <http://mediakeberagaman.com>.

------. (2009) FGD Pluralisme "merapatkan barisan mengusung keragaman. Diambil pada tanggal 4 Desember 2009, dari <http://abe-project.blog.frienster.com>.

------. (2009) FGD Evaluation of communication materials. Diambil pada tanggal 3 Desember 2009 dari <http://en.wordpress.com/tag/fgd>.

Bogdan, R., & Taylor, S.J. (1992). *Pengantar metoda penelitian kualitatif*. (Terjemahan Arief Furchan). (Judul asli: Introduction to qualitative research methodes a phenomenological approach to the social science. New York: John Wiley & Sons). Surabaya: Usaha Nasional.

Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (1994). Introduction: entering the field of qualitative research dalam Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (Eds). *Handbook of qualitative research*. New York: Sage Publications.

Djudju Sudjana. (2006). *Evaluasi pendidikan luar sekolah untuk pendidikan nonformal dan*

- pengembangan sumber daya manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Giddens, A. (1995). *Kapitalisme dan teori sosial modern, suatu analisa karya tulis Marx, Durkheim dan Marx Weber*. Jakarta: UI Press.
- Irwanto. (2006). *Focused group discussion*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Isa, W. (2006). *Metodologi perencanaan partisipatif best practise untuk pelaksanaan musrenbang*. Jakarta: MCW & YAPPIKA.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis*. (2th ed): Sage
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-dasar penelitian kualitatif, tata langkah dan teknik-teknik teoritisasi data*. (Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien). (Judul asli : Basics of qualitative research grounded theory procedures and techniques). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwan, D. (2005). *Pengantar studi penelitian kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zamroni. (1992). *Pengantar pengembangan teori sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.